



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN YOGYAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MOHAMAD IRHAS EFFENDI
2. Jabatan : REKTOR
3. NHK : 510312

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.428.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 254 m²/200 m² di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000
2. Tanah Seluas 438 m² di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 380.000.000
3. Tanah Seluas 199 m² di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
4. Tanah Seluas 1896 m² di KAB / KOTA SLEMAN, WARISAN Rp. 110.000.000
5. Tanah Seluas 806 m² di KAB / KOTA SLEMAN, WARISAN Rp. 55.000.000
6. Tanah Seluas 255 m² di KAB / KOTA SLEMAN, WARISAN Rp. 33.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 273.000.000

1. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
2. MOBIL, HONDA CIVIC Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 95.000.000
3. MOBIL, TOYOTA KIJANG Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 42.000.000



D. SURAT BERHARGA	Rp.	420.000.000
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	829.053.714
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	2.992.053.714
III. HUTANG	Rp.	10.762.175
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.981.291.539

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpnn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpnn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.